

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program
Strata Satu pada Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RAMADHAN
17911

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Ramadhan
NIM/BP : 17911/2010
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Februari 2014

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Yuskal Kusman, M.Pd
NIP. 19540713 198103 1 001

Pembimbing II



Drs. Irsvad, M.Pd
NIP: 19630630 199001 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


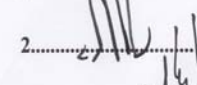
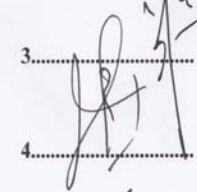
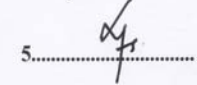

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian
Skripsi Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang**

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI SE-KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Ramadhan
NIM/BP : 17911/2010
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Februari 2014

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|---|---|
| Ketua : Drs. Yuskal Kusman, M.Pd | 1.  |
| Sekretaris : Drs. Irsyad, M.Pd | 2.  |
| Anggota : Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd | 3.  |
| Anggota : Drs. Syahril, M.Pd | 4.  |
| Anggota : Lusi Susanti, S.Pd, M.Pd | 5.  |

ABSTRAK

Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Oleh : Ramadhan/2014

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan sementara yang menunjukkan bahwa fungsi Komite Sekolah belum terlaksana sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pengurus Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri se – Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas pada tahun 2013 yang berjumlah 37 orang. Alat pengumpulan data adalah angket model skala Likert. Sebelum angket digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba, hasilnya menunjukkan angket tersebut valid dan reliabel. Data diolah dengan menggunakan teknik rata-rata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan: (1) dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan berada pada kategori cukup, dengan skor rata-rata 3,54; (2) dalam mendorong orangtua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan berada pada kategori cukup, dengan skor rata-rata 3,42; (3) dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan berada pada kategori cukup, dengan skor rata-rata 3,19; dan (4) dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan berada pada kategori cukup, dengan skor rata-rata 3,53. Secara umum pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pendidikan berada pada kategori cukup baik, dengan skor rata-rata 3,42.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
3. Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd selaku ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
4. Drs. Yuskal Kusman, M.Pd selaku pembimbing I dan Drs. Irsyad, M.Pd selaku pembimbing II.
5. Staf dosen beserta karyawan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan serta Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian

7. Pengurus Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
8. Keluarga yang tidak henti-hentinya memberi motivasi kepada penulis
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan demi penyelesaian skripsi ini

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal dan diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak nantinya.

Padang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 4 |
| C. Batasan Masalah .. | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Kegunaan Penelitian | 7 |
| G. Kegunaan Hasil Penelitian | 8 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | |
| A. Kajian Teori | 9 |
| B. Kerangka Konseptual | 20 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 22 |
| B. Populasi dan Sampel Penelitian | 22 |
| C. Definisi Operasional | 23 |
| D. Instrumen Penelitian..... | 24 |
| E. Jenis Data | 26 |
| F. Sumber Data | 27 |
| G. Prosedur Pengumpulan Data | 27 |
| H. Teknik Analisis Data | 27 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 29 |
| B. Pembahasan | 52 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Jumlah Pengurus Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan..... | 23 |
| Tabel 2 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Memberi Masukan, Pertimbangan dan Rekomendasi dalam Menyusun Kebijakan dan Program Pendidikan..... | 30 |
| Tabel 3 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Memberi Masukan Mengenai Kebijakan dan Program Pendidikan, RAPBS, Kriteria Kinerja Satuan..... | 32 |
| Tabel 4 Rekapitulasi Skor Rata-Rata Tentang Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Memberikan Masukan, Pertimbangan dan Rekomendasi..... | 34 |
| Tabel 5 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Mendorong Orang tua Murid Berpartisipasi untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan..... | 36 |
| Tabel 6 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Mendorong Masyarakat Berpartisipasi untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan | 38 |
| Tabel 7 Rekapitulasi Skor Rata-rata tentang Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Mendorong Orang Tua Murid dan Masyarakat Berpartisipasi dalam Pendidikan..... | 40 |
| Tabel 8 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Menerima Dana Sumbangan Masyarakat | 41 |

| | |
|--|----|
| Tabel 9 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Menetapkan Iuran Komite Sekolah kepada Orang tua Siswa | 43 |
| Tabel 10 Rekapitulasi Skor Rata-rata tentang Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Menggalang Dana Masyarakat dalam Rangka Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan | 45 |
| Tabel 11 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Kebijakan, Program, Penyelenggaraan dan Keluaran Pendidikan di Satuan Pendidikan | 46 |
| Tabel 12 Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Melakukan Evaluasi terhadap Kebijakan, Program, Penyelenggaraan dan Keluaran Pendidikan di Satuan Pendidikan | 48 |
| Tabel 13 Rekapitulasi Skor Rata-rata tentang Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap Kebijakan, Program, Penyelenggaraan dan Keluaran Pendidikan di Satuan Pendidikan | 50 |
| Tabel 14 Pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Kerangka konseptual Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah SMPN Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan | 21 |
|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran I Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 71 |
| Lampiran II Angket Penelitian Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan | 73 |
| Lampiran III Rekapitulasi Data Uji Coba Instrumen Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah | 78 |
| Lampiran IV Data Hasil Penelitian | 91 |
| Lampiran V Dokumentasi Penelitian | 93 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten untuk mengatur pemerintahnya atau hak otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam bidang pendidikan juga ada perubahan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan melalui Komite Sekolah.

Dibentuknya Komite Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah, maka oleh para kelompok yang berkepentingan (*Stakeholder*) dibentuklah Komite Sekolah. Depdiknas (2002:13) mengatakan bahwa Komite Sekolah adalah suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para Stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses hasil pendidikan. Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dengan peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan arahan maupun dukungan tenaga pada tingkat satuan pendidikan. Jika dilihat dari sifatnya, Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Artinya Fungsi Komite Sekolah mempunyai kaitan erat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Sehingga optimalisasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sangat ditentukan juga oleh optimalisasi pelaksanaan fungsi Komite Sekolah.

Adapun fungsi dari Komite Sekolah sebagaimana yang dijelaskan KEPMENDIKNAS. RI. NO. 044/U/2002. Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu:

(1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; (3) menampung dan menganalisis, aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dari fenomena sebagai berikut.

1. Komite Sekolah kurang aktif. Hal ini terlihat dari seringnya pengurus Komite Sekolah tidak mengikuti rapat di sekolah sehingga pengurus Komite Sekolah tidak ikut memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah tersebut.
2. Kurangnya dorongan dari Komite Sekolah pada orang tua siswa dan masyarakat. Rendahnya minat orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi di sekolah dikarenakan pengurus Komite Sekolah tidak bisa meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa keikutsertaan orang tua dan masyarakat di sekolah itu sangat penting.
3. Minimnya dukungan dana dari masyarakat baik secara individu, kelompok maupun secara organisasi mengindikasikan bahwa kurangnya usaha yang dilakukan pengurus Komite Sekolah dalam menggalang dana untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
4. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan Komite Sekolah kurang melakukan evaluasi dan pengawasan di sekolah, pengurus Komite Sekolah jarang untuk memantau kondisi di sekolah, selain itu pengurus Komite Sekolah juga kurang memberi penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan sekolah.

Fenomena di atas membuktikan bahwa fungsi Komite Sekolah kurang terlaksana dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi sekolah. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian ini mengenai

bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Partisisipasi dari orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah masih rendah
2. Komite sekolah kurang terlibat secara aktif untuk memberikan sumbangan pikiran, ide, pendapat yang sangat diperlukan dalam menyusun kebijakan program pendidikan di sekolah
3. Usaha yang dilakukan Komite Sekolah untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan ataupun kegagalan sekolah dalam melaksanakan program-programnya kurang optimal
4. Pelaksanaan fungsi komite sekolah masih di atas kertas saja, belum terealisasi dengan baik

C. Pembatasan Masalah

Menurut KEPMENDIKNAS RI. NO. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ada beberapa fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah: (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan

pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; (3) menampung dan menganalisis, aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal – hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan cukup luasnya ruang lingkup penelitian ini serta adanya keterbatasan penulis yang tidak memungkinkan untuk meneliti semua fungsi Komite Sekolah tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi fungsi Komite Sekolah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan

2. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai:

1. Pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.
2. Pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

3. Pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

F. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Bagaimana pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait, secara rinci penelitian ini dapat berguna:

1. Sebagai masukan bagi pengurus Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi di sekolah.
2. Sebagai masukan bagi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan mengenai pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Sebagai masukan bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan mengenai pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai wadah yang berperan mengawasi, mengontrol atas kebijaksanaan di suatu sekolah mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga mempunyai tanggung jawab terhadap tercapainya penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 dijelaskan: "Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah"

Sedangkan Tilaar (2000:85) mengemukakan bahwa: "Komite Sekolah adalah mitra kerja sekolah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah, di mana keterlibatan praktisi pendidikan sangat dituntut. Sedangkan Sapari (2003:2) mengemukakan bahwa "Komite Sekolah di tingkat sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang menjadi jembatan dalam mengatasi masalah – masalah yang akan dihadapi serta dapat mengakomodasi semua tuntutan, ide dan argumentasi masyarakat terhadap kebijaksanaan pendidikan"

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah adalah suatu organisasi yang independen atau mandiri mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan secara umum.

2. Keanggotaan Komite Sekolah

Menurut Depdiknas (2002:8) keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur – unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Menurut Depdiknas (2002:8), anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen – komponen sebagai berikut:

- a. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang di pilih secara demokratis.
- b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, dan pemuka adat)
- c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- d. Pejabat pemerintah setempat (kepala desa/lurah, kepolisian, koramil, DEPNAKER, KADIN, dan instansi lain)

- e. Dunia usaha/industri/pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain – lain)
- f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
- g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain – lain)
- h. Perwakilan siswa bagi tingkat SMP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
- i. Perwakilan forum alumni SD/SMP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari orang – orang berkepentingan dengan pendidikan, seperti perwakilan orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dunia usaha, pakar pendidikan, organisasi profesi pendidikan, perwakilan siswa dan alumni.

3. Kepengurusan Komite Sekolah

Menurut Depdiknas (2002:8) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang – kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang – bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

Depdiknas (2002:9) menyatakan Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
- b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
- c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya

Menurut Depdiknas (2002:9) mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan AD dan ART.
- b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.

Berdasarkan uraian di atas disampaikan bahwa kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang –

bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dipilih berdasarkan musyawarah dan secara demokratis. Masing-masing pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu berupaya agar terselenggaranya pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan baik.

4. Kedudukan dan Tujuan Komite Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002, Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, yang terdiri dari satu atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdasarkan pada satuan – satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggaraan pendidikan. Badan ini tidak mempunyai hubungan yang setara dengan lembaga pemerintah.

Menurut Depdiknas (2002:7) menjelaskan tujuan dari Komite Sekolah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan kondisi dan suasana transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan kedudukan dan tujuannya, maka nampak jelas Komite Sekolah ini tidak terlepas dari pemerintah atau sejenis badan/organisasi yang di bawah naungan pemerintah. Meskipun keanggotaan Komite Sekolah adalah orang – orang yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap pendidikan.

5. Fungsi Komite Sekolah

Menurut KEPMENDIKNAS RI. NO. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ada beberapa fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah: (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu; (3) menampung dan menganalisis, aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal – hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan; (6)

menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya akan diuraikan berikut ini.

1. Mendukung tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu: tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan secara tak langsung merubah persepsi masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Fungsi ini juga mendorong agar masyarakat mempunyai komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bukti bahwa komitmen masyarakat tumbuh yaitu ikut serta, hadir atau terlibat dalam setiap kegiatan yang direncanakan sekolah.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu: kerja sama yang terjalin antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) perorangan dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan membawa dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, misalnya; dalam memberikan pengajaran sekolah bersama dengan DUDI mendatangkan staf ahli yang dianggap

kompeten memberikan materi pengajaran, atau diberikannya kesempatan bagi siswa untuk bekerja setelah tamat pendidikan. Kerja sama ini juga dapat dilakukan dengan memberikan bantuan materi, memberikan sumbangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam bentuk buku, alat-alat laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan ataupun kelas baru. Fungsi ini menekankan upaya-upaya yang dilakukan Komite Sekolah dalam mendukung komitmennya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pada sekolah-sekolah keterampilan fungsi ini telah berjalan, terlihat adanya keterlibatan DUDI dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat: aspirasi, ide, tuntutan yang diajukan masyarakat bila diakomodir dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga sekolah dapat mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang yang ada dan dimiliki.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan: dalam pelaksanaan fungsi ini Komite Sekolah dapat memberikan masukan tentang kebijakan yang dapat dilaksanakan sekolah. Selain itu

Komite Sekolah juga dapat terlibat dalam membuat dan merancang program pendidikan yang akan dilaksanakan.

- b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), fungsi ini memberikan kesempatan pada Komite Sekolah untuk terlibat tidak saja merancang anggaran pendidikan belanja sekolah tapi ikut memikirkan sumber dana yang akan didapat dalam membantu kelancaran pendidikan.
- c) Kriteria Kinerja Satuan Pendidikan, fungsi ini sangatlah penting, karena Komite Sekolah ikut memikirkan apa saja kriteria yang harus ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan.
- d) Kriteria Tenaga Kependidikan, selain kriteria kinerja, Komite Sekolah juga ikut memikirkan dan menerapkan kriteria tenaga kependidikan yang akan mengajar di sekolah, latar belakang pendidikan, keterampilan yang harus dimiliki, usia dan kompetensi yang harus dimiliki.
- e) Kriteria Fasilitas Pendidikan, Komite Sekolah diberikan wewenang untuk menetapkan fasilitas apa saja yang harus dipenuhi sekolah, mulai dari ruang kelas, buku-buku yang digunakan, metode yang diberikan dan alat-alat bantu yang digunakan dalam menunjang pendidikan.

f) Hal-hal terkait dengan pendidikan, Komite Sekolah juga ikut berfungsi menjalin kerja sama, melakukan inovasi yang pada prinsipnya mendukung penyelenggaraan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan: partisipasi orang tua dan masyarakat akan muncul bila adanya komitmen dan perhatian masyarakat terhadap pendidikan. Partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi yang menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa semua orang berhak mendapat pendidikan yang bermutu.

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan: tumbuhnya partisipasi akan memudahkan menggalang dana masyarakat, berarti persepsi masyarakat bahwa pendidikan tanggung jawab pemerintah telah berubah. Menggalang dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan merupakan fungsi Komite Sekolah yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bermutu di sekolah, sangat dibutuhkan adanya dukungan dana yang cukup besar. Sumber-sumber dana yang ada pada organisasi sekolah selama ini sangat terbatas, karena itu perlu adanya dukungan dana dari masyarakat baik secara individu, kelompok maupun secara organisasi. Hal ini

didasari oleh Undang-Undang NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga”. Dengan demikian konsekuensi logis dari tanggung jawab tersebut adalah membina dan menggalang kerja sama antara berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan dan pengajaran di sekolah.

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan: Komite Sekolah berhak mengevaluasi kebijakan atau penyelenggaraan pendidikan bila tidak sesuai dengan tujuan, misi, dan visi sekolah. Bila fungsi ini berjalan dengan baik, maka pendidikan yang bermutu akan tercapai dengan baik pula. Adapun yang dimaksud dengan evaluasi dalam hal ini adalah kegiatan untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Komite Sekolah yang sudah dilakukan. Menurut Manulang (1981:23) evaluasi merupakan proses penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan tindakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Sehubungan dengan pengertian pengawasan, Siagian (2003:112) menyatakan bahwa: “pengawasan sebagai proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang

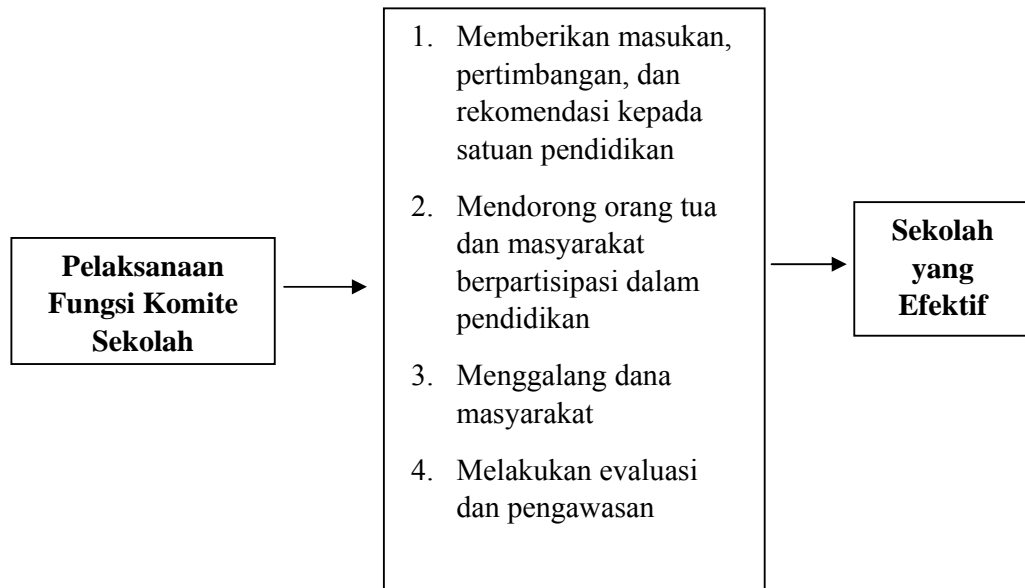
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat sekolah, baik kebijakan yang sudah berjalan maupun kebijakan yang akan dilaksanakan.

B. Kerangka Konseptual

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Karena itu Komite Sekolah mempunyai fungsi yang sangat besar untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan fungsi Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sangat beragam, karena itu pada penelitian fungsi Komite Sekolah yang dilihat adalah: a) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, b) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, c) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, d) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pelaksanaan semua fungsi Komite Sekolah di atas akan tergambar dalam kerangka konseptual berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah SMPN Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian maka dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,54.
2. Fungsi Komite Sekolah dalam mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,42.
3. Fungsi Komite Sekolah dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,19.
4. Fungsi Komite Sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,53.

5. Secara umum fungsi Komite Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan skor rata-rata 3,42.

B. Saran

Dari simpulan tersebut di atas maka, disampaikan beberapa saran antara lain:

1. Komite sekolah diharapkan aktif dalam mengikuti rapat di sekolah sehingga komite sekolah dapat memberikan masukan, pertimbangan dan merekomendasi kepada sekolah.
2. Komite sekolah diharapkan memberikan dorongan pada orang tua siswa dan masyarakat agar orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
3. Komite sekolah diharapkan usahanya untuk mendapatkan dukungan dana dari masyarakat baik secara individu, kelompok maupun secara organisasi sehingga dapat menggalang dana untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah.
4. Komite sekolah diharapkan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan di sekolah, memantau kondisi di sekolah dan memberikan penilaian kebijakan yang telah dilaksanakan sekolah sehingga meningkatkan mutu pendidikan sekolah.
5. Secara umum komite sekolah diharapkan untuk dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

6. Kepada peneliti lanjutan diharapkan untuk menelaah serta meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada sekolah dengan mengambil objek yang berbeda dan aspek yang berbeda pula.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Depdiknas. RI. (2000). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Buku 2: Panduan Penyusunan Proposal dan Pelaporan MPMBS)*. Jakarta: Depdiknas Irjen Dikdasmen Dirjen Dikmenum
- Depdiknas. (2002). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- _____. (2002). *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- _____. (2002). *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Peranan dan Fungsinya di Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Statistik Pendidikan Jilid II*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Kepmendiknas. RI. No. 044/U/2002. *Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*
- Manulang, M. (1981). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sapari, Agus. (2003). *Peranan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Siagian, P. Sondang. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung